



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Potret Skandal *Bailout* Bank Century dalam Pemberitaan Media Massa Edisi 25 November 2009

Fitri Dwi Lestari^{1*} dan Dani Setiadarma²

¹Universitas Dian Nusantara, Jakarta, Indonesia, fitri.dwi.lestari@undira.ac.id

²Universitas Dian Nusantara, Jakarta, Indonesia, dani.setiadarma@undira.ac.id

*Corresponding Author: fitri.dwi.lestari@undira.ac.id

Abstract: *The mass media presents a perspective on an event to the public through the news packages presented. Because it is a perspective, the news presentation certainly cannot represent an event as a whole but only represents part of the event. So that the same event often produces news with different perspectives when presented in the form of news in two or more mass media. Differences in perspectives that appear in the news in the mass media can occur because of the media work system involving media crews, namely reporters, photographers, cameramen, editors, producers including editor-in-chiefs who are commonly referred to as journalists or journalists. Each journalist or journalist has a different educational background, experience and ideology so that the same event from two different journalists has the potential to produce different news. It is important for the public to know that the news presented in the mass media is basically not the actual event. News is only part of the event that is captured by the media crew and presented back as information. The more data a journalist obtains, the closer the news package will be to reality. A person's understanding of an event is only a snapshot limited by frame and time, while the real reality is something that is constantly moving. With this mindset, the data obtained by a journalist is still limited by the frame and time, namely with what point of view he sees an event and within what period of time the observation takes place. Based on this tendency, the researcher wants to see how the projection of the Century Bank bailout scandal in three mass media, namely Kompas Daily, Koran Tempo, and Media Indonesia.*

Keywords: *Media, Bank, Century, Bailout.*

Abstrak: Media massa menyajikan perspektif atas suatu peristiwa untuk masyarakat melalui paket berita yang disuguhkan. Karena bersifat perspektif, sajian berita tentu tidak bisa mewakili sebuah peristiwa secara keseluruhan melainkan hanya mewakili bagian dari peristiwa tersebut. Sehingga dari peristiwa yang sama kerap kali dihasilkan berita dengan perspektif yang berbeda ketika disajikan dalam bentuk berita di dua atau lebih media massa. Perbedaan perspektif yang muncul dalam pemberitaan di media massa bisa terjadi karena sistem kerja media yang melibatkan awak media yaitu reporter, fotografer, juru kamera, editor, produser termasuk pimpinan redaksi yang biasa disebut sebagai jurnalis atau wartawan. Setiap wartawan atau jurnalis memiliki latar belakang pendidikan pengalaman juga ideologi yang berbeda sehingga

dari peristiwa yang sama dari dua jurnalis yang berbeda berpotensi melahirkan berita yang berbeda. Penting untuk diketahui publik bahwa berita yang tersaji di media massa, pada dasarnya bukanlah peristiwa yang sesungguhnya. Berita hanya bagian dari peristiwa yang berhasil ditangkap awak media dan disajikan kembali sebagai sebuah informasi. Semakin banyak data yang diperoleh seorang jurnalis maka paket berita yang dihasilkan akan semakin mendekati kenyataan yang sesungguhnya. Pemahaman seseorang akan sebuah peristiwa, hanyalah hasil snapshot yang terbatas frame dan waktu, sementara realitas yang sesungguhnya adalah sesuatu yang terus bergerak. Dengan pola pikir ini, maka data yang diperoleh seorang jurnalis tetap terbatas oleh frame dan waktu, yakni dengan sudut pandang apa dia melihat suatu peristiwa dan dalam jangka waktu berapa lama pengamatan itu berlangsung. Atas dasar kecenderungan tersebut peneliti ingin melihat bagaimana protret skandal *bailout* Bank Century di tiga media massa yakni Harian Kompas, Koran Tempo, dan Media Indonesia.

Kata Kunci: Media, Bank, Century, Bailout.

PENDAHULUAN

Skandal Bank Century adalah kasus perbankan terbesar paska era reformasi di Indonesia. Skandal perbankan ini mendapat perhatian serius hampir di semua media massa, baik cetak maupun elektronik. Besarnya perhatian publik pada skandal ini, tidak hanya karena menyangkut jumlah uang yang sangat besar namun juga karena melibatkan pejabat publik yang memiliki posisi penting di negeri ini, yakni mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono, yang kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden untuk periode 2009 - 2014, mendampingi Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Bank Century adalah bank kecil dibanding seluruh aset perbankan nasional. Dalam makalahnya yang dimuat di media online Okezone.com, Ihsanudin Noorsy menjelaskan bahwa posisi kredit Bank Century hanya 0,42 persen dibanding total kredit nasional, dana pihak ketiga (DPK) bank ini hanya 0,68 persen dibanding DPK perbankan nasional, asetnya hanya 0,72 persen dibanding total aset perbankan nasional, Bank Century sama dengan debitur kecil. Karena kecilnya, bank ini tak banyak diketahui orang sebelumnya. Namun sejak paruh terakhir tahun 2009 lalu, bank yang masuk katagori bank gurem ini menjadi primadona pemberitaan di media massa nasional. Bukan karena prestasi gemilang, namun karena permasalahan keuangan sehingga harus diselamatkan dengan gelontoran uang negara trilyunan rupiah. Sekitar 6,7 trilliun rupiah uang negara digelontorkan ke bank kecil ini melalui program bailout (bantuan injeksi dana segar untuk perusahaan yang bangkrut baik oleh pemerintah maupun konsorsium dengan imbalan mendapat peran kendali terhadap perusahaan yang dibantu), jumlah bantuan keuangan yang sangat besar untuk ukuran bank sebesar Bank Century.

Media massa pun berlomba-lomba memberitakan skandal perbankan ini. Berita yang mengupas skandal *bailout* Bank Century muncul terus menerus di berbagai *platform* media massa dengan bingkai atau *framing* yang beragam. Salah satu momen yang memicu keragaman *framing* pemberitaan terkait kasus skandal *bailout* Bank Century adalah peristiwa voting di DPR yang memilih opsi A, membenarkan kebijakan *bailout* vs opsi C, menyalahkan kebijakan *bailout* Bank Century.

Di kalangan pengamat ekonomi juga timbul perbedaan pendapat ada yang menyalahkan kebijakan bailout Bank Century seperti yang diutarakan Iman Sugema, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. "Semakin saya menghayati dokumen presentasi BI di rapat KSSK yang berjudul 'Analisis Resiko Sistemik Sistem Perbankan Indonesia', semakin saya tidak meyakini keabsahan landasan argument yang dibangun". Sementara sebagian pengamat lainnya membenarkan kebijakan penyelamatan Bank Century seperti yang disampaikan A Tony Prasetyantono, Kepala Pusat Studi Ekonomy dan Kebijakan

Publik Universitas Gajah Mada yang menilai kebijakan bailout Bank Century telah mempertimbangkan banyak faktor sehingga tidak semua besaran yang terukur itu tepat untuk mengambil keputusan. Tony enyebut judgment yang sifatnya kualitatif dalam banyak kasus justru bisa sangat menentukan.”

Perbedaan kecenderungan berita atau framing seperti ini adalah hal yang lumrah dan wajar. Tidak ada media massa yang benar benar menyodorkan berita sama persis dengan realita sesungguhnya. Berita hanya mewakili sebagian dari wajah realita. Media massa hanya menawarkan perspektif atas suatu realita dan semakin banyak perspektif yang diterima masyarakat maka akan semakin baik. Dalam hal ini kebebasan pers akan memungkinkan munculnya banyak perspektif tentang suatu peristiwa dan masyarakat pun bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendekati realita.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tema yang dipilih yakni studi kasus pada produksi berita, objek penelitian ini adalah produksi berita di media massa. Sementara produk berita yang diteliti adalah berita tentang skandal *bailout* Bank Century di tiga media massa yakni Harian Kompas, Koran Tempo, dan Media Indonesia. Sesuai dengan objek penelitian, maka penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif.

John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti (Raco, J.R., 2010) Tentang penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikanya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif ini lazimnya menggunakan beberapa metode yakni pengamatan, wawancara juga penelaahan dokumen (Moleong, Lexy J. 2008:9).

Penelitian ini diawali dengan anggapan bahwa berita yang diterbitkan di berbagai media massa merupakan hasil perspektif media massa terhadap suatu kejadian atau realitas. Tidak ada satu perspektif pun yang berhasil menangkap seluruh sisi realitas yang diamati. Karenanya, perspektif tentu tidak bersifat menyeluruh melainkan terbatas bahkan mengandung bias, hanya mewakili wajah bagian tertentu dari sebuah realitas.

Ada beberapa jenis penelitian yang masuk dalam kategori penelitian kualitatif. John Craswell memperkenalkan lima jenis metode penelitian kualitatif. Kelima metode ini adalah: Biografi, Fenomenologi, *Gorunded-Theory*, Ethnografi dan Study Kasus. Masing masing jenis penelitian kualitatif ini memiliki keunikan dan ciri khas. Dari kelima jenis metode penelitian kualitatif tersebut, metode studi kasus akan dipilih dalam penelitian ini. Pemilihan ini berkaitan dengan tema penelitian yang dianggap cocok dengan menggunakan metode penelitian study kasus yakni metode kualitatif yang mengupas suatu kasus tertentu secara mendalam berdasar informasi yang dikumpulkan sebanyak mungkin atau selengkap mungkin (Raco, J.R., 2010:49).

Sedikitnya ada tiga tahap yang mesti dilalui dalam penelitian studi kasus ini. Ketiga langkah tersebut, menurut Patton adalah pengumpulan data tentang individu, masyarakat, atau suatu program, kemudian mendata, meringkas dan mengklasifikasikan dan menganalisis data-data yang telah di kumpulkan tersebut dan terakhir menuliskan laporan penelitian secara jelas dan terstruktur (Raco, J.R., 2010:51). Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, terjadi kritikan terhadap objektifitas hasil penelitian studi kasus, pasalnya interpretasi peneliti sangat besar dalam proses analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sampel Berita pada Peristiwa Penyerahan Hasil Analisa Investigasi BPK atas Kasus Bailout Bank Century pada DPR di Tiga Media Massa Nasional

Dalam penelitian ini ada tiga sampel berita seputar skandal bailout Bank Century dari tiga media massa nasional. Ketiga berita tersebut dimuat pada terbitan edisi tanggal 25 November 2009. Ketiga berita tersebut antara lain; 1) “BUKTI DUKUNGAN HARUSNYA NYATA, KPK Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Bank Century” dimuat di Harian Kompas. 2) “Budiono, Sri Mulyani Didesak Mengundurkan Diri” dimuat di Media Indonesia. 3) “Pemerintah dan BI Pertanyakan Audit BPK BI Berbalik Ragu Terhadap Persepsi BPK Soal MoU Uni Eropa” dimuat di Koran Tempo.

1. Berita di Harian Kompas

BUKTI DUKUNGAN HARUSNYA NYATA

KPK Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Bank Century

Jakarta, Kompas Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menyatakan dukungannya pada penuntasan Kasus Bank Century dengan menonaktifkan pejabat yang terkait dengan kasus itu. Presiden juga harus mendorong Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan menyampaikan data aliran dana ke Panitia Hak Angket Bank Century.

Ekonom Kwik Kian Gie dan Drajad Wibowo menyampaikan hal itu kepada wartawan sesuai mengadakan pertemuan informal dengan sejumlah anggota DPR pengusul hak angket Bank Century, Selasa (24/11) di Jakarta. “Presiden mengatakan setuju hak angket dan kasus Bank Century diusut tuntas. Kalau begitu perintahkan PPAT untuk memberikan semua data aliran dana ke Panitia Hak Angket DPR,” kata Kwik lagi.

Kwik juga merasa gembira ditengah citra DPR yang terpuruk masih ada elemen dari delapan fraksi yang lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan partainya.

Drajad meminta Presiden untuk segera menonaktifkan pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang saat itu Budiono dan Sri Mulyani Indrawati, untuk mempermudah penyelidikan dan proses hukum lainnya. Apalagi hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPR secara tegas berpendapat, penyaluran dana penyertaan modal sementara ke Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008, sebesar 2,8 triliun, tak punya dasar hukum. Perubahan Peraturan Bank Indonesia (BI) maupun Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menunjukkan indikasi penyalahgunaan kewenangan.

Drajad juga meminta Presiden segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu) untuk membatalkan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring pengaman Sistem Keuangan yang ditolak DPR dan sudah dikonfirmasi BPK.

KPK Tunggu Audit BPK

Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil audit BPK terkait aliran dana ke Bank Century. Hingga Selasa, KPK belum mendapatkan hasil audit BPK itu walau DPR dan Presiden sudah mendapatkannya.

“Kami masih menunggu hasil audit dari BPK. Tanpa audit BPK, KPK belum bisa bergerak terkait kasus Century,” kata Johan Budi, Juru Bicara KPK. KPK meminta BPK mengaudit Bank Century sejak Juni 2009. Permintaan itu didasarkan laporan masyarakat.

Menurut Johan, hasil audit BPK sangat menentukan proses berikut yang akan diambil KPK. Jika KPK menemukan indikasi pidana, tahap pemeriksaan Bank Century bisa ke penyidikan.

Akbar Faisal, anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Selasa, meyakini, usulan hak angket untuk menyelidiki kegagalan dalam pengucuran dana talangan pada Bank Century, yang menyedot uang negara Rp. 6,7 triliun, tak akan terbendung. Namun, rakyat harus

mengawal usulan ini untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya penumpang gelap yang akan memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan mereka.

Hal senada disampaikan Kurdi Moekri, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). “Semoga hak angket ini tak diganggu penumpang baru yang memiliki kepentingan lain,” paparnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir berharap Presiden tidak hanya beretorika dengan ajakan mendukung hak angket Bank Century. Jika hanya retorika, ia bisa kehilangan kepercayaan rakyat. (sut/aik/now/mam/har)

Analisis berita:

1) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Masalah yang diangkat dalam berita di Harian Kompas edisi 25 November 2009 seputar kasus skandal bailout Bank Century ini adalah dukungan presiden pada penuntasan skandal Bank Century yang dianggap belum nyata. Presiden beberapa kali menyatakan mendukung penyelesaian Bank Century, karenanya Presiden diminta untuk memberikan dukungannya secara nyata.

Dukungan secara nyata yang dimaksud adalah penonaktifan pejabat Komite Stabilitas Sistem keuangan (KSSK) yakni Budiono dan Sri Mulyani. Seperti terlihat dalam penggalan berita berikut:

“Drajad meminta presiden untuk segera menonaktifkan pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang saat itu Budiono dan Sri Mulyani Indrawati, untuk mempermudah dan penyelidikan proses hukum lainnya.”

Dengan kata lain, dukungan presiden atas penuntasan kasus Bank Century selama ini dinilai belum nyata. Tuntutan agar presiden memberikan dukungannya ini juga terlihat dalam judul berita yang dipilih “Bukti Dukungan Harus Nyata, KPK Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Bank Century”.

Masalah lain yang juga diangkat adalah sulitnya panitia Hak Angket Bank century mendapatkan data aliran dana dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Karenanya presiden juga dituntut untuk mendorong PPATK memberikan data aliran dana pada kasus Bank Century kepada Panitia Hak Angket Bank Century. Tuntutan kepada presiden tersebut di sampaikan oleh dua narasumber yakni Kwik Kian Gie dan Drajat Wibowo yang ditaruh di awal berita.

2) Penyebab Masalah (*Causal Interpretation*)

Dalam berita berjudul “Bukti Dukungan Harusnya Nyata, KPK Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Bank Century” yang terbit di Harian Kompas ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan BPK dianggap sebagai aktor (penyebab masalah) tersendatnya penyelesaian kasus Bank Century.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap tidak memberikan dukungan nyata bagi penyelesaian kasus Bank Century. Tuntutan agar presiden memberikan dukungannya bahkan sudah terlihat dari judul berita yang dipilih. Begitu juga pada bagian awal berita sudah diangkat tuntutan pengamat ekonomi akar presiden memberikan dukungannya secara nyata.

Tuntutan pada presiden juga diulang di alinia terkahir berita dengan mengangkat harapan dari ketua PAN Sutrisno Bachir. Presiden jangan hanya beretorika dalam mendukung penyelesaian kasus Bank Century, kurang lebih begitu harapan Sutrisno Bachir.

Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BPK juga dianggap sebagai penyebab masalah. BPK dianggap memperlambat penyelesaian kasus Bank Century karena tidak segera memberikan hasil audit investigasinya kepada KPK.

3) Evaluasi moral (*Moral Evaluation*)

Harian Kompas dalam berita ini, memposisikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pihak yang tidak mendukung penyelesaian kasus Bank Century. Sehingga penyelesaian kasus Bank Century tidak lancar.

Porsi berita lebih banyak menyoroti tuntutan agar presiden segera memberikan dukungan pada penyelesaian kasus Bank Century secara nyata. Di awal berita sudah diajukan statemen dua pengamat ekonomi, Kwik Kian Gie dan Drajat Wibowo agar presiden menunjuka dukungannya. Presiden akan dianggap tidak mendukung penyelesaian kasus skandal Bank Century bila tidak mencopot Budiono dan Sri Mulyani.

4) Saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*)

Nampak jelas dalam berita ini, Kompas melalui narasumber yang dimuat dalam berita, merekomendasikan agar Presiden segera memberikan dukungan nyata bagi penyelesaian kasus Bank Century. Bagi Kwik Kian Gie dukungan nyata presiden harus dilakukan dengan mendorong Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan menyampaikan data aliran dana ke Panitia Hak Angket Bank Century. Sementara Drajad Wibowo merekomendasikan agar presiden menonaktifkan pejabat KSSK Budiono dan Sri Mulyani. Sedangkan Sutrisno Bachir juga menekankan agar dukungan presiden tidak sekedar retorika belaka.

Frame: Dukungan presiden terhadap penuntasan kasus Bank Century tidak nyata. Agar dukungannya nyata maka presiden harus melakukan sedikitnya dua hal, pertama mendorong PPATK untuk memberikan data aliran dana Bank century kepada panitia angket Bank Century. Kedua presiden segera menonaktifkan pejabat KSSK Budiono dan Sri Mulyani untuk mempermudah proses pemeriksaan keduanya.

2. Berita di Media Indonesia

Budiono, Sri Mulyani

Didesak Mengundurkan Diri

Pasca penyerahan hasil audit investigasi dari BPK, didukung terhadap penggunaan hak angket terus bertambah.

Audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pencairan Bank Century memperlihatkan keterlibatan Budiono dan Sri Mulyani. Akibatnya, sejumlah kalangan mendesak mereka untuk mengundurkan diri dari jabatan masing masing.

“Untuk lebih maksimal menangani kasus ini, pihak terkait seperti Budiono dan Sri Mulyani harus mundur,” kata Ketua Masyarakat Madani Ismed Hasan Putro di Jakarta, kemarin.

Pernyataan senada juga dilontarkan Juru Bicara Petisi 28 Haris Rusli. Menurutnya, pengunduran diri itu diperlukan untuk memperlancar pemeriksaan. “Itu penting agar pemeriksaan berjalan objektif, tidak terpengaruhi posisi mereka,” tandasnya.

Desakan serupa juga dilontarkan mantan Presiden Abdurrohman Wahid. Bahkan Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur, mengimbau kedua orang itu untuk ditangkap. “Mestinya ditangkap. Coba kalau maling ayam, pasti sudah ditangkap,” tandas Gus Dur.

Sebelumnya, ketua BPK Hadi Purnomo menyerahkan hasil audit investigasi atas Bank Century ke Ketua DPR Marzuki Alie. Dalam audit tersebut, terbuka peran Budiono dan Sri Mulyani dalam menggelontorkan dana talang Rp 6,7 triliun. BPK juga menemukan indikasi rekayasa dan perbuatan melawan hukum dalam pengambilan keputusan pengucuran talangan tersebut.

Hadi menjelaskan penggelontoran dana talangan Rp 6,7 triliun diputuskan dalam rapat tanggal pada 21 November 2008. Rapat itu dihadiri antara lain oleh Gubernur BI Budiono yang kini menjadi Wapres. Menkeu Sri Mulyani yang merangkap Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Sekretaris KSSK Raden Pardede.

Wakil Presiden Budiono mengaku belum bisa mengomentari hasil audit tersebut. “Setelah mempelajari secara cermat dan seksama, tanggapan sepenuhnya akan diberikan selengkap mungkin,” kata Wapres.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati menegaskan pengucuran dana kepada Bank Century merupakan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Sesuai UU tentang LPS, Komite Koordinasi tidak punya kewenangan menyetujui atau tidak pengucuran atau penyertaan modal sementara oleh LPS,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, dukungan terhadap penggunaan hak angket DPR atas kasus tersebut terus bertambah. Termasuk F-PD DPR yang awalnya bersikukuh menolak penggunaan hak angket.

“Kami sudah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Kasus Bank Century dari BPK. Kesimpulannya ditemukan banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan penerapan standar aturan penanganan bank bermasalah,” kata ketua F-PD DPR Anas Urbaningrum.

Anas menjelaskan pihaknya selama ini memang menunggu hasil audit BPK. “Kami akan mendukung 100% hak angket Bank Century. Seluruh anggota F-PD kami instruksikan untuk ikut tanda tangan usul angket Bank Century,” katanya.

Pengusul hak angket dari F-PDIP Maruarar Sirait menyatakan sampai saat ini pendukung angket mencapai 270 anggota DPR. “Semakin banyak dukungan ini membenarkan apa yang telah kami perjuangkan sejak awal,” tandasnya.

Dukungan serupa juga dilontarkan Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mustafa Kamal. “Hasil audit investigasi Bank Century belum ada keterbukaan soal transaksi aliran dana serta pejabat yang terlibat,” katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Romahurmuzi mengatakan F-PPP juga mendukung hak panitia angket. “Dukungan penuh dari anggota F-PPP DPR terhadap usulan hak angket karena hasil audit investigasi BPK belum ada keterbukaan dan masih mengecewakan,” katanya.

Korban Century

Puluhan nasabah Bank Century yang terkabung dalam Forum Nasabah Bank Century meminta DPR untuk membantu menyelesaikan pengembalian dana nasabah Bank Century yang totalnya mencapai Rp 1,7 triliun.

“Kami telah ditipu manajemen Bank Century. Semula kami memasukan uang dalam bentuk deposito, tapi dalam perjalanannya uang itu dialihkan menjadi investasi dana tetap terproteksi,” ujar Koordinator Forum Nasabah Bank Century, Siput saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR.

Hanya saja, sambungnya, manajemen Bank Century menolak mengganti uang nasabah dengan alasan produk investasi dana tetap terproteksi, bukan produk perbankan dan transaksi dilakukan di luar pembukuan Bank Century.

Sehingga, ketika Bank Century diambil alih oleh LPS. LPS pun menolak memberikan penggantian. Forum Nasabah Bank Century ini juga menyerahkan putusan pengadilan tertanggal 8 Agustus 2009 yang memutuskan Bank Century terbukti merugikan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Secara terpisah, sebanyak 27 nasabah reksadana ilegal PT Antaboga Delta Sekuritas yang dipasarkan Bank Century tanpa izin nasabah, menggugat Bank Century ke Pengadilan Negeri Surakarta, Kota Solo, Jawa Tengah.

Para nasabah berharap Bank Century yang saat ini berubah nama menjadi Bank Mutiara dapat mengembalikan uang sejumlah simpanan mereka di bank tersebut. **(Akhmad Mustain /MP/RR/Rin/Tup /*/BS/Ant/P-1)**

Analisis berita:

1) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Berita di Media Indonesia edisi 25 November 2009 seputar kasus skandal bailout Bank Century ini menyoroti tuntutan sejumlah kalangan agar Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri. Pengunduran diri dua pejabat ini dianggap penting guna kelancaran penanganan kasus Bank Century.

Setidaknya ada hasil wawancara dari dua nara sumber yakni Ketua Masyarakat Madani Ismed Hasan Putro serta Juru Bicara Petisi 28 Haris Rusli yang menyatakan tuntutan agar Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri. Terlihat dalam alinea berita berikut ini:

“Untuk lebih maksimal menangani kasus ini, pihak terkait seperti Budiono dan Sri Mulyani harus mundur,” kata Ketua Masyarakat Madani Ismed Hasan Putro di Jakarta, kemarin.

Pernyataan senada juga dilontarkan Juru Bicara Petisi 28 Haris Rusli. Menurutnya, pengunduran diri itu diperlukan untuk memperlancar pemeriksaan. ‘Itu penting agar pemeriksaan berjalan objektif, tidak terpengaruhi posisi mereka,’ tandasnya.”

Bahkan lebih tegas Media Indonesia juga mengangkat sound bite mantan Presiden Gus Dur agar kedua orang itu ditangkap. Terlihat betapa Media Indonesia tegas sekali menyuarakan pentingnya kedua tokoh ini untuk menanggalkan jabatan agar pengusutan kasus Bank Century bisa berjalan lancar.

2) Penyebab Masalah (*Causal Interpretation*)

Dalam berita berjudul “Budiono, Sri Mulyani Didesak Mengundurkan Diri” memosisikan Budiono dan Sri Mulyani sebagai sumber masalah. Tuntutan agar kedua tokoh pejabat ini mundur menggambarkan bahwa keduanya merupakan biang kerok dari permasalahan Bank Century yang selama ini terjadi.

Secara tidak langsung berita yang diturunkan Media Indonesia ini mengatakan bahwa Budiono dan Sri Mulyani adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas timbulnya permasalahan Bank Century. Karenanya keduanya harus diperiksa, keduanya harus diusut. Agar proses pemeriksaan juga proses pengusutan berjalan lancar, keduanya harus mengundurkan diri.

Media Indonesia juga mengangkat sound bite dari mantan Presiden Gus Dur yang mengatakan Budiono dan Sri Mulyani sebagiknya ditangkap. Statemen yang sangat etgas memosisikan Budiono dan Sri Mulyani sebagai pelaku kriminal.

3) Evaluasi moral (*Moral Evaluation*)

Tanggal 25 November 2009, Media Indonesia menegaskan kesalahan Budiono dan Sri Mulyani dalam kasus Bank Century. Keduanya dianggap sebagai sumber masalah yang semestinya bertanggung jawab. Bahkan keduanya dianggap sebagai pelaku kriminal dengan tuntutan harus ditangkap.

Prosentase porsi berita yang menyalahkan Budiono dan Sri Mulyani cukup besar. Setidaknya ada tiga narasumber yang dipakai untuk menekan posisi Budiono dan Sri Mulyani. Ismed Hasan (Ketua Masyarakat Madani) dan Haris Rusli (Juru Bicara Petisi 28) menyuarakan agar Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri, sementara Abdurrohman Wahid (Mantan Presiden) lebih tegas mengatakan agar keduanya ditangkap. Sementara narasumber yang lain mendukung pembentukan hak angket guna mengust kasus ini.

4) Saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*)

Media Indonesia kali ini secara tegas merekomendasikan agar Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri agar penyelesaian kasus Bank Century bisa berjalan. Dari awal berita hingga akhir dipenuhi tuntutan yang memojokan kedua tokoh ini.

Di awal berita ada tuntutan pengunduran diri bahkan tuntutan agar keduanya ditangkap. Bagian akhir juga menyoroti dukungan banyak pihak pada pembentukan hak angket Bank Century. Frame: Budiono dan Sri Mulyani dituntut mengundurkan diri, kalau perlu ditangkap. Keduanya dianggap sebagai tokoh utama dibalik kasus skandal Bank Century.

3. Berita di Koran Tempo Pemerintah dan BI Pertanyakan Audit BPK

BI Berbalik Ragu Terhadap Persepsi BPK Soal MoU Uni Eropa
JAKARTA -- Bank Indonesia dan pemerintah mempertanyakan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus Bank Century. Auditor negara itu dianggap tidak mendistribusikan secara lengkap data dan informasi yang sudah disampaikan.

Tanggapan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, serta pejabat sementara Gubernur BI, Darmin Nasution, dalam konferensi pers bersama di gedung Departemen Keuangan kemarin sore.

Hadir pula Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito, mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Fuad Rahmani.

Menurut Sri, yang disampaikan BPK dalam hasil auditnya tidak menyeluruh. Pendapat Darmin senada. "Keterangan BPK sepotong-sepotong," ujarnya. "Padahal kami sudah serahkan semua data, termasuk rekaman. Tidak ada selebar dokumen pun yang tersisa."

Dalam hasil audit yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, Senin lalu, BPK menyimpulkan ada sejumlah pelanggaran dalam keputusan penyelamatan Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun. BPK mempertanyakan alasan dampak sistemik yang dijadikan dasar pemerintah menyelamatkan bank bobrok itu.

Sri menjelaskan, data dan analisis BI tentang keadaan Century yang diterima KSSK saat keputusan penyelamatan dibuat pada 20 November 2008 telah cukup menggambarkan kondisi bank itu.

Soal dampak sistemik, Sri pun menjelaskan, saat itu ada 23 bank setara atau lebih kecil dari Century yang punya masalah likuiditas dan permasalahan serupa dengan Century. "Memang Century bank kecil." Tapi, jika dibiarkan, kata Sri, "Bisa timbul rush dan merembet ke bank lainnya."

Sri juga memberikan sejumlah indikator yang menggambarkan rapuhnya kondisi perekonomian nasional saat itu akibat krisis global. Indeks saham merosot dari 2.830 pada Januari 2008 menjadi tinggal 1.155 pada November 2008.

Nilai surat utang negara juga tertekan hebat. Yield atau tingkat imbal hasil surat utang negara meningkat dari rata-rata 10 persen sebelum krisis menjadi 17,1 persen. Padahal setiap kenaikan satu persen menambah beban negara Rp 1,4 triliun. "Berarti beban pemerintah melonjak lebih dari Rp 8 triliun," kata Sri.

Tekanan lainnya, pada 2008 risiko gagal bayar kredit (credit default swap) Indonesia meningkat tajam dari 250 basis point menjadi lebih dari 1.000 basis point, yang berarti country risk Indonesia sangat tinggi. Cadangan devisa pun menyusut dari sekitar US\$ 60 miliar menjadi hanya US\$ 51 miliar. "Pertimbangan sistemik itu terukur dari indikator-indikator ini," kata Sri.

Menurut Darmin, faktor-faktor tekanan global itulah yang diabaikan oleh audit BPK. Darmin juga mempertanyakan kesimpulan BPK yang menyatakan bahwa pertimbangan sistemik oleh pemerintah tidak didasari analisis kuantitatif, melainkan lebih kualitatif.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Uni Eropa yang dijadikan dasar audit BPK, kata Darmin mengutip halaman 34 isi nota itu, justru disebutkan dalam situasi tertentu, qualitative judgement lebih diperlukan ketimbang informasi kualitatif. "Judgement pun tidak berkonotasi negatif," Sri menambahkan. **AGOENG WIJAYA | REZA MAULANA | GRACE S GANDHI**

Analisis berita:

1) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Berita di Koran Tempo edisi 25 November 2009 seputar kasus skandal bailout Bank Century ini mengangkat tanggapan pemerintah atas hasil audit investigasi BPK. Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menganggap BPK tidak mendistribusikan secara lengkap data dan informasi yang sudah disampaikan.

Penyesalan BI dan pemerintah ini terlihat dalam alinia berikut:

“Menurut Sri, yang disampaikan BPK dalam hasil auditnya tidak menyeluruh. Pendapat Darmin senada. "Keterangan BPK sepotong-sepotong," ujarnya. "Padahal kami sudah serahkan semua data, termasuk rekaman. Tidak ada selemba dokumen pun yang tersisa."

Berita di Koran Tempo ini menyuarakan bahwa pemerintah dalam hal ini KSSK memiliki argumentasi yang kuat dalam pengambilan kebijakan bantuan pada Bank Century. Diantara argumentasi pemerintah adalah adanya krisis global, kondisi ekonomi nasional yang rapuh, surat utang negara yang tertekan, indkes saham jatuh, cadangan devisa menurun dan lain sebagainya.

Argumentasi pemerintah tersebut ditegaskan dalam hasil wawancara dengan Sri Mulyani yang dimuat dalam berita. Di dalam berita ini termuat Sri Mulyani mengatakan bahwa pertimbangan sistemik pada Bank Century berdasar pada beberapa indikator.

Alinia terkahir berita juga masih menegaskan argumentasi pemerintah tersebut seperti terlihat berikut:

“Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Uni Eropa yang dijadikan dasar audit BPK, kata Darmin mengutip halaman 34 isi nota itu, justru disebutkan dalam situasi tertentu, qualitative judgement lebih diperlukan ketimbang informasi kualitatif. "Judgement pun tidak berkonotasi negatif," Sri menambahkan.

2) Penyebab Masalah (*Causal Interpretation*)

Dalam berita berjudul “Pemerintah dan BI Pertanyakan Audit BPK, BI Berbalik Raguh Terhadap Persepsi BPK Soal MoU Uni Eropa” Koran Tempo justru menempatkan PBK sebagai sumber masalah. Hasil audit investigasi BPK yang menyalahkan keputusan KSSK karena telah menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dianggap tidak mempertimbangkan beberapa faktor.

Sanggahan terhadap hasil investigasi BPK ini disampaikan Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Pejabat sementara Gubernur BI Darmin Nasution. Seperti terlihat dalam penggalan alinia berita berikut:

“Menurut Sri, yang disampaikan BPK dalam hasil auditnya tidak menyeluruh. Pendapat Darmin senada. "Keterangan BPK sepotong-sepotong," ujarnya. "Padahal kami sudah serahkan semua data, termasuk rekaman. Tidak ada selemba dokumen pun yang tersisa."

3) Evaluasi moral (*Moral Evaluation*)

Tanggal 25 November 2009, Koran Tempo menyuarakan kekesalan BI dan pemerintah yang menganggap proses investigasi BPK kurang profesional. Pasalnya BPK tidak mempertimbangkan beberapa faktor yang dipakai BI dan pemerintah dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut pemerintah argumentasi mereka atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik cukup rasional karena banyak faktor yang mendukung pengambilan keputusan itu. BI dan pemerintah tak habis mengerti kenapa BPK tidak mempertimbangkan beberapa faktor tersebut dalam investigasinya.

4) Saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*)

Koran tempo menilai permasalahan ada di BPK, yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh BI dan KSSK. Karenanya rekomendasi tidak langsung dari berita di Koran Tempo ini adalah BPK semestinya juga mempertimbangkan beberapa faktor yang melatar belakangi penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Frame: Pemerintah dan BI menyayangkan BPK yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Karena hasil investigasi BPK dianggap tidak berimbang atau tidak adil.

Kesimpulan Analisis Berita Edisi 25 November 2009 di Harian Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo

Berita yang terbit pada Harian Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo pada edisi Senin, 25 November 2009, menampilkan potret skandal bailout Bank Century yang berbeda-beda. Secara umum, dua pihak yang berhadapan dalam kasus ini adalah PBK sebagai pihak yang melaporkan hasil analisa investigasi Bank Century sementara BI dan pemerintah menjadi pihak kedua yang memberikan kebijakan pemberian dana talangan bailout untuk Bank Century yang kemudian menjadi masalah.

Realitas kasus skandal Bank Century dipotret secara berbeda oleh Harian Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo pada terbitan edisi Senin, 25 November 2009. Berita di Harian Kompas menyoroti tuntutan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menonaktifkan dua pejabat KSSK yakni Budiono dan Sri Mulyani. Presiden juga diminta untuk mendorong Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberikan data aliran dana di Bank Century kepada Panitia Hak Angket Bank Century.

Pada hari yang sama, Media Indonesia menyatakan bahwa sumber masalah pada Bank Century tertumpu pada dua pejabat publik, Budiono mantan Gubernur BI dan Sri Mulyani Menteri Keuangan RI. Keduanya dianggap bersalah karena telah menandatangani notulensi yang berisi penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sementara berita di Media Indonesia nampak lebih tegas dengan mengangkat tuntutan agar Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri. Bahkan ada pernyataan dari mantan Presiden Gus Dur agar Budiono dan Sri Mulyani ditangkap. Kedua tokoh ini dianggap sebagai sumber masalah pada kasus skandal Bank Century karenanya keduanya harus mengundurkan diri.

Sementara Koran Tempo menurunkan berita yang berbeda, Koran Tempo justru menyoroti kekecewaan pihak BI dan pemerintah karena analisa investigasi BPK tidak mempertimbangkan beberapa faktor. BPK semestinya mempertimbangkan beberapa faktor yang melatarbelakangi KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Ada ketidakadilan procedural dalam proses analisa investigasi BPK terhadap pemberian bantuan bailout kasus Bank Century.

Secara sederhana, pada berita edisi Selasa, 25 November 2009, terlihat perbedaan berita sebagai berikut:

- 1) Berita di Koran Kompas mengatakan adanya tuntutan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menonaktifkan Budiono dan Sri Mulyani dari jabatan masing masing.
- 2) Berita di Media Indonesia mengatakan adanya tuntutan agar Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri bahkan kalau perlu ditangkap karena keduanya dianggap bersalah dalam kasus Bank Century.
- 3) Berita di Koran Tempo mengatakan BI dan pemerintah kecewa atas hasil analisa investigasi BPK yang mengabaikan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan BI dan pemerintah mengambil kebijakan bailout pada kasus Bank Century.

KESIMPULAN

Dari sampel berita yang diteliti juga hasil wawancara, media massa memiliki cara yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa. Perbedaan yang lumrah dan wajar, persis seperti beraneka ragamnya pendapat orang akan suatu peristiwa. Dalam hal ini media massa menawarkan keragaman cara melihat dan cara bercerita.

Baik Harian Kompas, Media Indonesia maupun Koran Tempo memiliki cara tersendiri dalam memandang kasus bailout Bank Century. Hasilnya ada perbedaan isi atau bentuk berita pada peristiwa penyerahan hasil analisa investigasi BPK atas kasus bailout Bank Century kepada DPR di tiga media massa ini.

Jika nada kritik dalam berita di tiga media massa ini diberi kriteria halus, sedang dan keras, maka urutannya adalah Koran Tempo pada posisi halus, Harian Kompas pada posisi sedang dan Media Indonesia pada posisi keras. Secara sederhana, berita edisi 24 November di Koran Tempo mengatakan ada indikasi kesalahan oleh BI dan pemerintah, Harian Kompas mengatakan sistem BI lemah sementara Media Indonesia mengatakan Budiono dan Sri Mulyani adalah pejabat yang salah mengambil kebijakan pada kasus bailout Bank Century.

Perbedaan semakin mencolok pada berita edisi 25 November 2009. Pada edisi kali ini, berita di Harian Tempo justru menyalahkan BPK dengan mengikat kekecewaan BI dan pemerintah atas hasil analisa investigasi BPK karena mengabaikan beberapa faktor yang dipakai BI dan pemerintah sebagai pertimbangan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Harian Kompas pada hari yang sama mengangkat tuntutan agar SBY menonaktifkan Budiono dan Sri Mulyani sementara Media Indonesia secara tegas mengangkat tuntutan agar Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri atau ditangkap.

Baik Koran Tempo, Harian Kompas maupun Media Indonesia memiliki cara bercerita yang berbeda dalam pemberitaan pada peristiwa penyerahan hasil analisa investigasi BPK atas kasus bailout Bank Century kepada DPR ini, sehingga konstruksi realitas peristiwa tersebut menjadi berbeda. Perbedaan ini di satu sisi bisa menimbulkan kebingungan di kalangan pembaca, di sisi lain justru akan membuka ruang diskusi dan memberikan alternatif pemahaman yang berbeda bagi publik.

REFERENSI

- Assegaff, Dja'far H., 1985, *Jurnalistik Masa Kini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Barran, Stanley J., Penerjemah: Afriyanto dan Putri Iva Izzati, 2010, *Teori Komunikasi Massa, Dasar, Pergolakan dan Masa Depan*, Jakarta, Salemba.
- Bungin, Burhan, H.M., 2008, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing Konstruksi, Idiologi dan Politik Media*, Yogyakarta, LKiS.
[Http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/38398/11/11](http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/38398/11/11)
[Http://www.tempo.ci.id/ang/min/02/17/nas2.html](http://www.tempo.ci.id/ang/min/02/17/nas2.html)
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2009, *Jurnalistik Teory dan Praktek*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Okezone.com, Senin, 30 November 2009.
- Pusat Informasi Kompas, Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta.
- Raco, J.R., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sobur, Alek, 2006, *Analisis Teks Media*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Suryomiharjo, Abdurrachman dkk, 2002, *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Soesatyo, Bambang, 2010, *Skandal Gila Bank Century*, Jakarta, Ufuk Press.
- Soni, Aoysius BL de Rosary, 2010, *Century Gate, Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Sudibyo, Agus, 2009, Politik Media dan Pertarungan Wacana, Yogyakarta, LKiS.
Thohir, Erick, 2011, Pers Indonesia di Mata Saya, Jakarta, Republika Penerbit.